

## Education on Income Tax (PPh) Badan

### Edukasi pajak Penghasilan (PPh) Badan

Hardi<sup>1</sup>, Nurhayani Lubis\*<sup>2</sup>, Inova Fitri Siregar<sup>3</sup>, Sri Maryanti<sup>4</sup>, Nofrizal<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Lancang Kuning

\*e-mail: [hardi@unilak.ac.id](mailto:hardi@unilak.ac.id)<sup>1</sup>, [nurhayanalubis@unilak.ac.id](mailto:nurhayanalubis@unilak.ac.id)<sup>2</sup>, [inova@unilak.ac.id](mailto:inova@unilak.ac.id)<sup>3</sup>,  
[ssrimaryanti@yahoo.com](mailto:ssrimaryanti@yahoo.com)<sup>4</sup>, [Opizal@gmial.com](mailto:Opizal@gmial.com)<sup>5</sup>

#### Abstract

The background of partner selection is based on the situation analysis that students at the school are still not fluent in calculating corporate income tax 21. So that it requires additional understanding of this matter. To overcome the lack of ability of these students, the service team from the Faculty of Economics and Business, Lancang Kuning University offered a solution to provide education about PPh 21 corporate tax. And it was welcomed by the school. The purpose of this service is to improve the ability of students majoring in accounting at SMKN 1 Tapung in calculating income tax. This service was carried out on 15 August 2023 at SMKN 1 Tapung. This service was carried out on 15 August 2023 at SMKN 1 Tapung. To achieve the service objectives that have been previously stated, the implementation of this community service activity is carried out with a systematic method, which begins with the preparation stage, namely discussing with the school regarding what the current needs of students are and formulating the solutions provided. After that, enter the second stage, namely the implementation stage, at this stage the team provides education about corporate income tax 21 to students. This stage was attended by 29 students majoring in accounting. At this stage, students are directly involved in tax calculations so that students understand more about the concepts and how the calculation of PPh 21 Corporate tax applies in Indonesia. The last stage is evaluation, where this stage is one of the most important. Evaluation is intended to measure the success of this service. Evaluation is measured by giving questionnaires before and after the service. The results of the questionnaire from 29 students showed a significant improvement, and it can be concluded that this service was successful. As a continuation, it is hoped that the school can continue to educate students about the tax regulation updates. Because as is known, the regulations regarding taxes are constantly evolving.

**Keywords:** PPh 21, Income Tax

#### Abstrak

Latar belakang pemilihan mitra berdasarkan analisis situasi bahwa, siswa di sekolah tersebut masih belum lancar dalam menghitung pajak PPh 21 badan. Sehingga membutuhkan tambahan pemahaman mengenai hal tersebut. Untuk mengatasi kurangnya kemampuan siswa tersebut, tim pengabdian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning menawarkan solusi untuk memberikan edukasi mengenai pajak PPh 21 badan. Dan hal tersebut disambut baik oleh pihak sekolah. Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa jurusan akuntansi di SMKN 1 Tapung dalam menghitung pajak PPh. Pengabdian ini dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2023 di SMKN 1 Tapung. Untuk mencapai tujuan pengabdian yang telah disampaikan sebelumnya, maka pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan metode yang sistematis yakni diawali dengan tahap persiapan yaitu berdiskusi dengan pihak sekolah mengenai apa yang menjadi kebutuhan siswa saat ini dan merumuskan solusi yang diberikan. Setelah itu, masuk tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan, pada tahap ini tim memberikan edukasi mengenai pajak PPh 21 badan kepada siswa. Dimana pada tahapan ini diikuti oleh 29 orang siswa jurusan akuntansi. Pada tahap ini, siswa dilibatkan langsung dalam penghitungan pajak sehingga siswa lebih memahami mengenai konsep dan bagaimana perhitungan pajak PPh 21 Badan yang berlaku di Indonesia. Tahap terakhir adalah evaluasi, dimana tahapan ini menjadi salah satu yang terpenting. Evaluasi dimaksudkan untuk mengukur kesuksesan pengabdian ini. Evaluasi diukur dengan memberikan kuesioner sebelum dan sesudah dilakukan pengabdian. Hasil kuesioner dari 29 orang siswa menunjukkan peningkatan yang signifikan, dan dapat disimpulkan pengabdian ini berjalan dengan sukses. Sebagai kelanjutannya, diharapkan pihak sekolah dapat terus melakukan edukasi kepada siswa mengenai pembaharuan mengenai regulasi pajak tersebut. Karena seperti diketahui bahwa, praturan mengenai pajak terus berkembang.

**Kata kunci:** PPh 21, Pajak Penghasilan

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia menghasilkan pendapatan melalui perpajakan. Pajak adalah kontribusi keuangan wajib yang harus diberikan individu kepada pemerintah untuk mendukung pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pajak di Indonesia sebagai sumber utama penerimaan negara bersifat wajib dan harus dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan ([Astuti & Putriani, 2023](#)). Kepatuhan pajak seringkali dihubungkan dengan perilaku seseorang atau institusi yang memutuskan untuk taat pajak atau justru sebaliknya ([Dwianika & Nurhidayah, 2022](#)). Pajak merupakan sumber pendapatan utama dan paling signifikan bagi negara, yaitu sebesar 70% pendanaan APBN. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan perpajakan, khususnya fungsi anggaran, dimana pajak dipungut untuk menghimpun uang masyarakat yang selanjutnya digunakan untuk menunjang kebutuhan negara ([Selvi et al., 2020](#)).

Menjadi perhatian saat seluruh wajib pajak harus memenuhi kewajiban tersebut, tetapi di satu sisi literasi mengenai pajak dan perhitungannya masih kurang di masyarakat. Terlebih lagi undnag-undang mengenai pajak mengalami perubahan yang cepat dan dalam waktu yang cukup singkat. Sehingga, wajib pajak diwajibkan harus mengetahui dan mempelajari perhitungan pajak dengan benar dalam waktu yang cukup singkat. Yang terbaru, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dimana undang-undang pajak penghasilan terbaru telah diberlakukan sejak awal tahun 2022. Tentu saja hal ini menjadi sesuatu yang masih baru bagi wajib pajak. Sehingga literasi mengenai undang-undang pajak penghasilan ini sangat diperlukan. Peran Lembaga pemerintahan dan akademisi menjadi sangat penting mengenai literasi pajak ke masyarakat. Sehingga diharapkan nantinya, dengan memahamai dengan baik dan benar mengenai pajak penghasilan, masyarakat menjadi lebih taat pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi dan badan sehubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak tertentu ([Raharjo et al., 2022](#)). Pajak Penghasilan Badan merupakan jenis pajak subjektif, yang mempertimbangkan kondisi setiap wajib pajak sebagai faktor utama dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, setiap wajib pajak memiliki kewajiban pajak yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan situasi masing-masing. Hal ini memastikan bahwa pemungutan pajak dilakukan secara adil dan proporsional. ([Lativa et al., 2020](#)). Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu bentuk perpajakan langsung yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Pajak Penghasilan PPh 21 merupakan pungutan yang dipungut atas penghasilan yang diperoleh dari upah, gaji, biaya, tunjangan, dan sumber lain, tanpa memandang nama atau status seseorang, berkenaan dengan ketenagakerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib wajak orang pribadi ([Isnain et al., 2022](#)).

Perpajakan dan praktek perpajakan merupakan mata pelajaran yang harus diambil setiap siswa SMK jurusan Akuntansi. Setiap lulusan SMK jurusan akuntansi diharapkan memiliki kompetensi utama di bidang akuntansi dan kompetensi tambahan salah satunya adalah perpajakan ([Okfitasari et al., 2022](#)). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan lembaga pendidikan yang bertanggung jawab atas pelatihan dan penyiapan peserta didik agar mahir dalam berbagai bidang profesional. Para siswa dibekali dengan informasi dan kemampuan yang diperlukan untuk unggul dalam program khusus mereka. Kualitas sangat penting untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar.

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Tapung, adalah salah satu sekolah yang memiliki jurusan akuntansi. Sama seperti sekolah kejuruan pada umumnya, sekolah ini juga memiliki mata pelajaran pajak pada kurikulumnya. Menjadi tanggung jawab sekolah untuk

memberikan pengajaran yang baik bagi siswanya untuk nantinya dapat mengikuti ujian kompetensi dengan baik sehingga hasil yang didapatkan menjadi sangat memuaskan. Uji Kompetensi Keahlian (UKK) adalah proses menilai kemampuan seseorang dalam suatu klasifikasi dengan mengumpulkan bukti yang relevan. Siswa dan siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengikuti UKK. UKK terdiri dari skema sertifikasi yang memenuhi jenjang kualifikasi peserta UKK dan mencakup kemampuan untuk melaksanakan tugas khusus, operasional, dan penjaminan mutu. Tujuan penilaian hasil belajar, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK, adalah sebagai berikut: (1) mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar siswa; (2) mengetahui tingkat pertumbuhan dan perkembangan siswa; (3) menentukan masalah belajar siswa; (4) mengetahui efektivitas proses pembelajaran; dan (5) mengetahui pencapaian kurikulum. Tujuan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) adalah sebagai berikut: (a) mengevaluasi kemampuan siswa SMK yang telah menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kompetensi keahlian yang ditempuh; (b) memfasilitasi siswa SMK yang akan menyelesaikan pendidikan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat uji kompetensi; dan (c) memastikan bahwa sertifikasi kompetensi berfokus pada kompetensi lulusan SMK sesuai dengan Kerangka Nasional (Sudradjat & Djanegara, 2020).

Mengingat hal tersebut, sekolah harus lebih serius dan maksimal dalam memberikan materi pelajaran kepada siswa. Salah satunya adalah dalam mata pelajaran pajak. Tetapi dalam hal ini, belum maksimalnya pemahaman siswa mengenai pajak khususnya PPh 21 badan menjadikan kendala dalam proses belajar mengajar. Sehingga, tim pengabdian mengambil celah ini dengan menawarkan solusi dengan memberikan edukasi pajak PPh 21 badan secara khusus kepada siswa. Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat lebih memahami konsep dan perhitungannya dengan baik dan tepat. Hal tersebut disambut baik oleh pihak sekolah.

Berdasarkan analisis situasi yang disampaikan, maka dapat berikut adalah permasalahan mitra yang dihadapi:

1. Siswa belum memahami dengan benar konsep pajak PPh 21 Badan karena peraturan mengenai pajak yang berubah-ubah
2. Siswa belum mampu menghitung PPh 21 badan dengan baik dan benar

## 2. METODE

Untuk mencapai solusi yang telah disampaikan sebelumnya, maka pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan metode yang sistematis yakni sebagai berikut:



Gambar 1: Tahapan Pengabdian

Terdapat 3 tahapan yang dilakukan dalam pengabdian ini, yaitu:

### 1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan wawancara yang dilakukan oleh tim kepada pihak sekolah. Hal ini dilakukan untuk melihat apa keluhan dan kendala yang dihadapi pihak sekolah. Setelah diketahui apa kendala yang dihadapi sekolah yakni salah satunya mengenai kurangnya pemahaman siswa mengenai pajak. Maka tim menawarkan solusi untuk mengatasi kendala tersebut dan diterima baik oleh pihak sekolah. Setelah itu, maka tim mempersiapkan berkas yang diperlukan sebagai bukti sekolah bersedia menjadi mitra

dalam pengabdian tersebut, yakni berupa penandatanganan surat pernyataan kesediaan bekerjasama sebagai mitra.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan ini, siswa diberikan materi mengenai Pajak PPh 21 Badan oleh ibu Inova Fitri Siregar, SE., M.,Ak. Ak., CA, beliau adalah dosen prodi akuntansi yang juga mengampu mata kuliah pajak di FEB Unilak. setelah diberikan materi dan pemahaman mengenai regulasi pajak PPh 21 Badan yang terbaru, selanjutnya siswa diberikan kasus mengenai perhitungan PPh 21 Badan. Pada tahapan ini juga dilakukan proses tanya jawab dari siswa ke pemateri.

Materi yang diberikan antara lain:

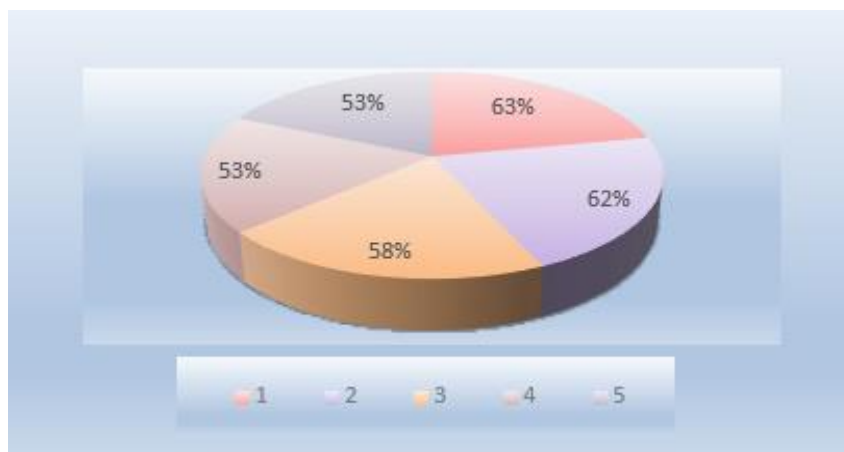
- 1) Undang-undang pajak mengenai PPh 21 badan
- 2) Siapa saja wajib pajak dalam pajak PPh 21 Badan
- 3) Mengenai tarif-tarif PPh 21 Badan
- 4) Sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan pajak PPh 21 Badan
- 5) Cara menghitung dan melaporkan SPT bagi wajib pajak PPh 21 Badan

## 3. Tahap Evaluasi

Sebagaimana pengabdian pada umumnya, tahap evaluasi menjadi salah satu hal yang paling penting. Evaluasi dimaksudkan untuk melihat seberapa besar keberhasilan kegiatan pengabdian ini dilakukan. Alat ukurnya adalah kuesioner yang diberikan sebelum dan sesudah dilakukan pengabdian..

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2023 di SMKN 1 Tapung, Kabupaten Kampar, Riau. Peserta pelatihan sebanyak 29 orang siswa jurusan akuntansi. Kegiatan pengabdian ini diawali dengan pemberian kuesioner kepada siswa untuk melihat seberapa besar kemampuan siswa dalam memahami PPh 21 badan. Hasil kuesioner menunjukkan dari 5 pernyataan yang diberikan, secara keseluruhan jawaban yang diberikan untuk setiap pernyataan bernilai 53%-63%. Hal ini menunjukkan bahwa setengah dari siswa masih belum memahami mengenai PPh 21 badan.



Gambar 2: Tabulasi kuesioner sebelum dilakukan pengabdian

Terdapat 5 pernyataan sederhana yang kami berikan di dalam kuesioner, yakni:

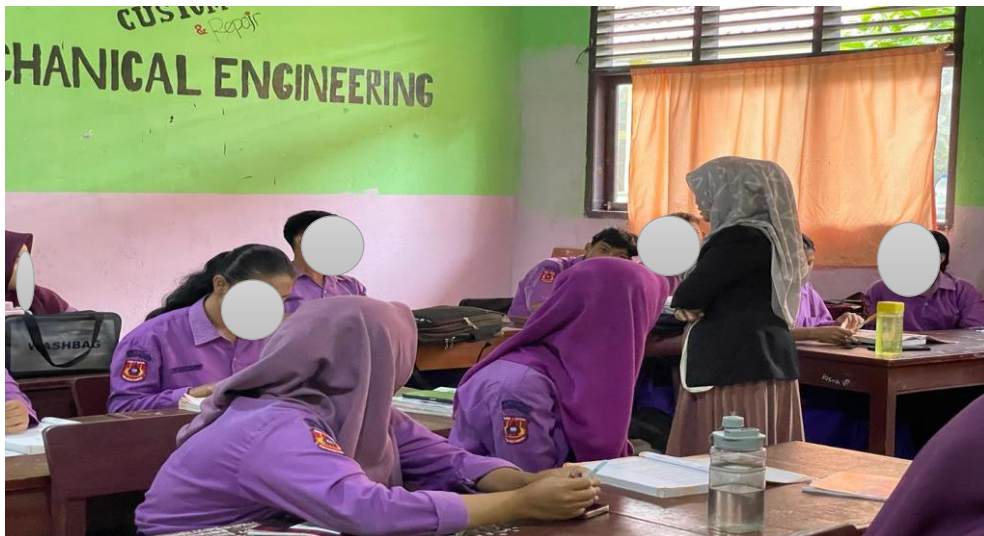
1. Saya mengetahui dengan baik apa yang dimaksud dengan PPh Badan  
Untuk pernyataan ini hasil rekapitulasi kuesioner dari 29 orang siswa adalah sebesar 63%
2. Saya mengetahui siapa saja yang dikenakan Pajak (PPh) badan  
Untuk pernyataan ini hasil rekapitulasi kuesioner dari 29 orang siswa adalah sebesar 62%

3. Saya mengetahui berapa tarif pajak PPh badan yang berlaku di Indonesia  
Untuk pernyataan ini hasil rekapitulasi kuesioner dari 29 orang siswa adalah sebesar 58%
4. Saya mengerti bagaimana cara menghitung atau melaporkan SPT tahunan PPh Badan  
Untuk pernyataan ini hasil rekapitulasi kuesioner dari 29 orang siswa adalah sebesar 53%
5. Saya mengetahui sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya  
Untuk pernyataan ini hasil rekapitulasi kuesioner dari 29 orang siswa adalah sebesar 53%

Setelah itu, dilanjutkan dengan materi mengenai PPh 21 Badan oleh Ibu Inova Fitri Siregar, SE., M.Ak. Ak., CA kepada siswa, dengan tujuan agar lebih meningkatnya pemahaman siswa dalam memahami PPh 21 badan. Materi yang diberikan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang pajak mengenai PPh 21 badan
2. Siapa saja wajib pajak dalam pajak PPh 21 Badan
3. Mengenai tarif-tarif PPh 21 Badan
4. Sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan pajak PPh 21 Badan
5. Cara menghitung dan melaporkan SPT bagi wajib pajak PPh 21 Badan

Materi ini dinilai sudah lengkap, diawali dengan regulasi mengenai pajak hingga bagaimana cara menghitung PPh 21 Badan. Setelah diberikan kasus mengenai perhitungan pajak, dimana diilustrasikan siswa di kelas tersebut adalah sebuah organisasi yang terdiri dari pemilik perusahaan, karyawan dan akuntan. Sehingga siswa berperan langsung dalam perhitungan pajak tersebut. Metode ini dilakukan agar siswa dapat merasakan menjadi bagian dari sebuah organisasi yakni sebuah perusahaan dengan kedudukan dan porsi mereka dalam organisasi tersebut.



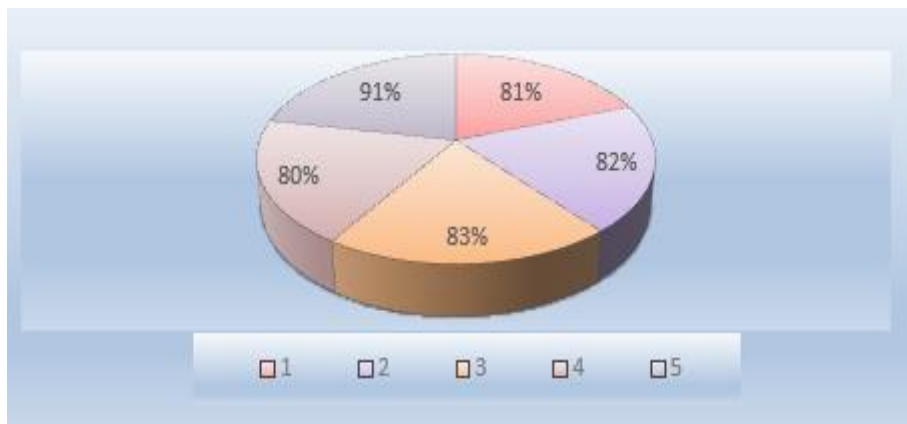
Gambar 3: Ibu Inova Fitri Siregar sedang memberikan materi

Hal ini dilakukan karena pada umumnya, materi pokok Pajak Penghasilan Pasal 21 cenderung berhubungan dengan pengerjaan soal-soal latihan berupa soal cerita saja tanpa dikaitkan dengan dunia nyata (Widiyawati & Susanti, 2016). Selain itu, Kajian mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 memerlukan lebih dari sekedar pemahaman teoritis, hal ini memerlukan pemahaman komprehensif tentang penerapan praktisnya. Setelah itu juga dilakukan tanya jawab mengenai PPh 21 badan. Keaktifan siswa menjadi salah satu kunci untuk menilai sukses atau tidaknya kegiatan pengabdian ini.



Gambar 4: Ibu InovaFitri Siregar sedang memberikan materi

Setelah seluruh materi dan kasus perhitungan PPh 21 badan tersampaikan. Tim memberikan kuesioner Kembali. Hal ini dimaksudkan untuk melihat seberapa besar peningkatan siswa dalam memahami materi dan perhitungan PPh 21 badan. Untuk kuesioner yang diberikan dengan pernyataan yang sama, didapatkan peningkatan yang signifikan yakni sebesar 80%-91%. Berikut adalah hasil rekapitulasi kuesioner setelah dilakukan pengabdian:



Gambar 5: Tabulasi kuesioner setelah dilakukan pengabdian

1. Saya mengetahui dengan baik apa yang dimaksud dengan PPh Badan  
Untuk pernyataan ini hasil rekapitulasi kuesioner dari 29 orang siswa adalah sebesar 81%
2. Saya mengetahui siapa saja yang dikenakan Pajak (PPh) badan  
Untuk pernyataan ini hasil rekapitulasi kuesioner dari 29 orang siswa adalah sebesar 82%
3. Saya mengetahui berapa tarif pajak PPh badan yang berlaku di Indonesia  
Untuk pernyataan ini hasil rekapitulasi kuesioner dari 29 orang siswa adalah sebesar 83%
4. Saya mengerti bagaimana cara menghitung atau melaporkan SPT tahunan PPh Badan  
Untuk pernyataan ini hasil rekapitulasi kuesioner dari 29 orang siswa adalah sebesar 80%
5. Saya mengetahui sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya  
Untuk pernyataan ini hasil rekapitulasi kuesioner dari 29 orang siswa adalah sebesar 91%

Hal ini menunjukkan kesuksesan pada kegiatan pengabdian ini. Walaupun mungkin belum sempurna, tetapi hasil ini sudah sangat baik. Terkonfirmasi bahwa kegiatan ini berhasil, untuk



## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, W., & Putriani, A. (2023). Peran Pajak dalam Meningkatkan Pembangunan Pendidikan di SMKN 7 Tangerang. *Journal on Education*, 5(2), 3546–3553. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.998>
- Dwianika, A., & Nurhidayah, F. (2022). Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pendampingan Dan Edukasi Pajak Kepada Guru SMKN 2 Tangerang Universitas Pembangunan Jaya Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 294–299. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.998>
- Isnain, A. R., Yasin, I., & Sulistiani, H. (2022). Pelatihan Perpajakan Pph Pasal 21 Pada Guru Dan Murid Smk N 4 Bandar Lampung. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 3(2), 293. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v3i2.2202>
- Lativa, Sanjaya, R., Farida, S. I., & Al, E. (2020). Pelatihan Perhitungan Pajak Pph Pasal 21, Pasal 23, Dan Pph Pasal 4 Ayat 2 Kepada Kepala Sekolah, Bendahara, Administrasi Smp Kota Tangerang Selatan Gugus 02. *Dedikasi PKM*, 1(1), 80–85.
- Okfitasari, A., Santoso, T. D., & Rohmah, S. N. (2022). Pelatihan Pengisian Spt Tahunan Dan Meningkatkan Kompetensi Perpajakan Dengan Uu Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bagi Guru Smk (Pkm Pada Smk Negeri 1 Karanganyar). *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 32–38. <https://doi.org/10.29040/budimas.v4i1.4236>
- Raharjo, T. P., Sugondo, L. Y., & ... (2022). Pelatihan Konsep, Pematangan, Pelaporan Dan Jurnal Akuntansi Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(9), 1689–1698. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JPM/article/view/3387>
- Selvi, S., Rahmi, N., & Arimbhi, P. (2020). Membangun Kepatuhan Perpajakan Sejak Dini Melalui Workshop Pengisian SPT PPh Orang Pribadi di SMKN 10 Jakarta. *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 133–139. <https://doi.org/10.31334/jks.v2i2.735>
- Sudradjat, & Djanegara, M. S. (2020). PKM Uji Kompetensi Bidang Keahlian Akuntansi Di SMK Bina Sejahtera Kota Bogor. *JADKES: Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 1(1), 21–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.37641/jadkes.v1i1.319>
- Widiyawati, L., & Susanti. (2016). Pengembangan Modul Administrasi Pajak Berbasis Kontekstual Pada Materi Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Untuk Siswa Kelas Xii Akuntansi Smk Negeri Di Surabaya. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 5(1), 1–7.